

RENCANA AWAL RENCANA KERJA(RENJA) Tahun 2020



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan By Pass Km 02 Gulai Banchah, Telp/Fax 0752 32382Bukittinggi Sumatera Barat

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 dengan tujuan ”Mengupayakan pengurangan resiko bencana dan mitigasi bencana untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi masyarakat dalam menghadapi dan menanggulangi bahaya bencana lainnya”. Hal ini merupakan tantangan yang harus ditanggung oleh seluruh pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi.

Alhamdulillah berkat kerjasama yang solid Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi dapat merealisasikan dengan disusunnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban Pemerintah Kota Bukittinggi serta merupakan dasar penyusunan akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi.

Demikianlah rencana kerja ini kami buat, mungkin saja ini ada kelemahan dan kekurangannya, kami harapkan kritik dan saran untuk perbaikannya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bukittinggi, Juni 2019

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BUKITTINGGI**


Drs. IBENTARO SAMUDRA, MM
NIP. 19650829 199308 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penyusunan	6
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kerja SKPD	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	26
III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	27
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	27
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Rencana Kerja	
4.2. Pendanaan	
V. PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

Sambutan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei saat ini yang memimpin delegasi Indonesia dalam acara pertemuan tingkat tinggi Word Humanitarian Summit WHS di Turki tgl 23-24 Mei 2016 menyampaikan tantangan pemimpin dunia saat ini :

1. Global warming
2. Bencana alam dan non alam
3. Konflik kekerasan
4. Migrasi

Bersama isu-isu Global tersebut diatas Pemerintah Indonesia dalam Bidang penanggulangan bencana bersama BNPB memberikan solusi pada upaya pencegahan dan pengarusutamaan pengurangan resiko atau dampak yang di adopsi dalam langkah konkrit yaitu :

- a) Indonesia berkomitment dalam pengarusutamaan dan pendekatan komprehensif dan sistimatis PRB sesuai kerangka kerja sama di Sendai Jepang (2015-2030).
- b) BNPB secara bersama pemangku kepentingan meningkatkan ketangguhan wilayah nusantara hingga desa/kelurahan tangguh menghadapi bencana.
- c) Bencana adalah urusan bersama, keterlibatan dunia usaha dan masyarakat sangat penting dalam menjadikan ketangguhan bangsa terhadap bencana, saat ini di tingkat desa ada lebih 1000 desa terlibat dalam membangun desa tangguh bencana.

Penanggulangan Bencana merupakan tanggung jawab bersama dan dilakukan secara gotong royong, Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bukittinggi telah merumuskan program dan kebijakan penanggulangan bencana pada Rencana Strategis BPBD Kota Bukittinggi 2016-2021

1.1 Latar Belakang

Sistem Penanggulangan Bencana Indonesia menurut UU No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang menjadi platform Nasional diawali dengan Legislasi, Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi. Perencanaan adalah suatu proses

untuk menentukan tindakan nyata masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan potensi sumber daya yang ada. Rencana kerja digunakan sebagai dasar/pedoman dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Penyusunan rencana kerja ini mengacu pada rencana strategis tahun 2016 – 2021 sehingga adanya kesinambungan dalam perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi 2016-2021. Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bukittinggi **“TERWUJUDNYA PENANGGULANGAN BENCANA YANG CEPAT, TEPAT, PROFESIONAL DAN TAWAKAL”**.

Misi untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk **4 (empat) buah Misi sesuai dengan peran-peran BPBD, adalah sebagai berikut:**

1. Membangun sarana dan prasarana serta sistim penanggulangan bencana yang handal.
2. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana dengan cara Mitigasi
3. Melaksanakan penanggulangan bencana yang terintegrasi, adil dan merata.
4. Meningkatkan pemberdayaan dan mendorong peran aktif masyarakat serta kerja sama dengan Intansi/lembaga/dunia usaha dalam penanggulangan bencana.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan cara menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terintegrasi. Dalam Undang-Undang tersebut Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerahnya. Untuk mengurangi resiko bencana semua kegiatan wajib menggunakan APBD masing – masing.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana ;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517) ;
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penannggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penannggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Penanggulangan Bencana ;
27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Dasar ;
28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penannggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana ;
29. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana ;
30. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman **Penggunaan Dana Siap Pakai** pada Status Tanggap Darurat Bencana ;
31. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 01 Tahun 2012 tentang Desa/Kelurahan Tangguh Bencana ;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 04);

34. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
36. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah BPBD Kota Bukittinggi ;
37. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 Nomor 13);
38. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
39. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021;
40. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
41. Peraturan Walikota Bukittinggi No 43 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III dan IV BPBD Kota Bukittinggi ;
42. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 32 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Propinsi Sumatera Barat tahun 2019;
43. Peraturan Walikota nomor 97 tahun 2017 tentang Perubahan Renstra Kota Bukittinggi tahun 2016-2021
44. Perwako Nomor 19 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi tahun 2019

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

- a. Merumuskan Perencanaan Penanggulangan Bencana Sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Mempersiapkan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana secara terarah, terpadu, dan terkoordinasi;

- c. Meningkatkan Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah menuju proporsional dan terarah;
- d. Untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang mengancam.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, yang terdiri dari: Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah: Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH yang terdiri dari Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 Dan Capaian Rencana Strategis

Pada tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittingg, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja program dan kegiatan mencapai 86% dengan pagu awal anggaran Rp. 1.383.589.440 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta limaratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah dan pada perubahan anggaran sebesar Rp. 2.341.456.130 (dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh ribu rupiah). Program kegiatan yang dapat ditampung adalah :

1. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam terdiri atas 4 kegiatan :
 - a. Sosialisasi/Penyuluhan/Pelatihan Pencegahan Penanggulangan Bencana
 - b. Oprasional Pusdalops PB
 - c. Kegiatan Jambore PRB dan Bulan Pengurangan Resiko Bencana
 - d. Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional
2. Program Pendidikan dan Pelatihan Kepada Aparat Penyelenggara Penanggulangan Bencana terdiri dari 1 kegiatan :
 - a. Pelatihan Gabungan BPBD, SAR, TAGANA, PMI, PUSDALOPS
3. Program Sistem Kebencanaan terdiri dari 2 kegiatan :
 - a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
 - b. Penyusunan Rencana Kontijensi Gempa

Target program dan kegiatan rencana kerja tahun 2018 hanya sebesar 70%. Begitu juga dengan perkiraan realisasi capaian target rencana strategic. Diharapkan kegiatan – kegiatan yang kurang berjalan pada tahun sebelumnya dapat terealisasi dengan baik pada tahun 2020. Tertuang pada T-C.29 terlampir.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Kota Bukittinggi

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Keg iatan (output)	Tar get Kine rja Cap aian Prog ram (Ren stra Pera ngk at Dae rah) Tah un 2019	Realisas i target Kinerja hasil progra m dan Kegiata n s/d (N-3) 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahu (TAHUN LALU/N-2) 2017			Target Progra n/ Kegiata n Renja SKPD Tahun berjala n 2018(N- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Rensta SKPD 2019 (TAHUN BERJALAN/N-1)		Catata n
					Tar get	Realis asi	Tingk at Realis asi (%)		Realis asasi Capai an	Tingk kat capai an (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5 +7+9)	11=(10/4)	12
	Program pelayanan administrasi		100	100	100	100	100				

RENJA BPBD 2020

	perkantoran										
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jenis surat menyurat	12	12	12	12	100	12	36	90	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening listrik/komunikasi yang dibayar	36	36	36	36	100	36	108	100	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang dilaksanakan	14	12	12	12	100	13	36	100	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Kebersihan Kantor yang dilaksanakan	1	1	1	1	100	1	3	100	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dipelihara	12	12	12	12	100	12	36	100	
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	12	12	12	12	100	12	36	100	

RENJA BPBD 2020

	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah cetak/penggandaan yang dilaksanakan	12	12	12	12	100	12	36	100	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor yang Komponen Instalasi Listrik / Penerangan dibeli	1	1	1	1	100	1	3	100	
	Penyediaan makanan dan minuman Rapat	Makanan dan Minuman kantor yang dibeli	12	12	12	12	100	12	36	100	
	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	1	12	1	1	100	1	3	100	
	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Pegawai Non PNS dibayar	12	12	12	12	100	12	36	100	

RENJA BPBD 2020

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	100	100	100	100	100	100	100	
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlengkapan kantor yang disediakan	1	1	2	1	100	1	3	100	
	Pembangunan Rehabilitasi gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor	2	1	2	0		0	1	100	
	Pengadaan Peralatan Kantor	terlaksananya pengadaan peralatan kantor	1	1	1	1	100	1	3	100	
	Pengadaan Mebeleur	Jenis Mebeleur yang diadakan	1	1	1	1	100	1	3	100	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jenis Kendaraan dinas/operasioan yang diadakan	1	1	0	1	100	1	3	100	
	Pengadaan tanah Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	-	1	2	0		1	2	100	

RENJA BPBD 2020

	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	2	1	2	0		0	1	100	
	Pemeliharaan berkala Gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Mebeleur Kantor	2	1	2	1	0	0	1	100	
	Pemeliharaan berkala Mebeleur kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Mebeleur Kantor	2	1	2	0	0	0	1	100	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100	100	100				100	100	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1	1	1	0	0	1	2	100	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100	100	100	100				

RENJA BPBD 2020

	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kerja		2	2	2	100	0	0	0	
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	laporan keuangan SKPD		2	2	2	100	0	0	0	
	Penyusunan rencana kerja dan keuangan SKPD	Rencana kerja dan rencana keuangan		2	2	2	100	0	0	0	
	Penyusunan Revisi Renstra	Revisi Renstra SKPD		1	-	-	0	0	0	0	
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam		80	60	70	70	70	75	80	80	
	Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan penanggulangan bencana	% kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	0	1		0	0	1	2	100	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan	% Penanggulangan bencana yang di	1	1	1	0	0	1	2	100	

RENJA BPBD 2020

	Bencana	tanggulangi									
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusdalops	% Pengendalian Penanggulangan Bencana	1	1	1	0	0	1	2	100	
	Operasional Pusdalops	% Pengendalian bencana	1	1	1	1	100	1	2	100	
	Pendamping ke BPBD Prov Jambore PRB	% Jumlah relawan yang ikut Kambore PRB	1	1	1	1	100	1	3	100	
	Penyediaan Dana Siap Pakai Darurat Bencana	% Operasional dan Bantuan darurat bagi korban bencana	1	1	0	0	0	1	2	100	
	Program Pendidikan dan Pelatihan Kepada Aparat Penyelenggara Penanggulangan Bencana		80	0	70			70	80	80	
	Pelatihan gabungan BPBD, SAR,	% Jumlah Aparatur dan	1	0	1			1	1	80	

RENJA BPBD 2020

	TAGANA PMI dan Pusdalops	relawan yang terlatih									
	Program Sistem Kebencanaan		70	0	0	0	0	70	70	70	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Pemetaan kawasan Rawan Bencana	% jumlah regulasi/kebijakan, dokumen PB	0	0	0	0	0	1	1	100	
	Pembuatan/penyusunan/perumusan Rencana Kontijensi menurut jenis bencana anggaran sharing dgn BNPB	% jumlah dokumen kontijensi per jenis bencana	0	0	0	0	0	1	1	100	
	Perumusan/penyusunan SOP Penanggulangan Bencana	% Jumlah dokumen SOP Penanggulangan Bencana	1	0	0	0	0	0	1	100	
	Jasa Informasi kebencanaan	% Jumlah informasi kebencanaan	0	1	0	0	0	0	0	0	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Jenis indikator yang dikaji dalam capaian kinerja pelayanan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III, dan IV Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi. Namun dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia ada beberapa program dan kegiatan dalam hal pengurangan resiko bencana dan peningkatan kapasitas Instansi dan Lembaga terkait penanggulangan bencana belum terakomodir pada tahun anggaran sebelumnya. Maka pada rencana kerja tahun 2019 ini terdapat penambahan program wajib/pokok dan kegiatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Terlampir table T-C.30.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SPM/ TAND AR NASIO NAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN (n-2)	TAHUN (n-1)	TAHUN (n)	TAHUN (n+1)	TAHUN (n-2)	TAHUN (n-1)	TAHUN (n)	TAHUN (n+1)	
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
1	Persentase Penurunan Resiko Bencana		84 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85%	85 %	85 %	85 %	
2	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana		80 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85%	85 %	85 %	85 %	
3	Persentase Rehabilitas Korban Bencana		90 %	96 %	97 %	98 %	99 %	90%	97 %	98 %	99 %	
4	Persentase Rekonstruksi Korban Bencana		90 %	96 %	97 %	98 %	99 %	90%	97 %	98 %	99 %	
5	Persentase Pelayanan yang Difasilitasi Perkantoran		55 %	55 %	70 %	80 %	85 %	60%	70 %	80 %	85 %	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

Pelayanan Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi harus ditingkatkan pada tahun – tahun selanjutnya agar dapat mengutamakan upaya pengurangan resiko bencana serta memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat sehingga rasa aman dan nyaman dari ancaman bahaya bencana dapat tercipta. Hal ini dikarenakan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang langsung berhubungan dengan keselamatan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut masih terdapat hambatan, diantaranya :

1. Belum tersedianya Legitimasi Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan bencana, baik pedoman umum seperti Rencana Penanggulangan Bencana, Kajian Resiko Bencana, Rencana Kontijensi Gempa dan Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana.
2. Sarana dan prasarana Penggualangan Bencana yang belum memadai.
3. Belum maksimalnya upaya peningkatan kapasitas aparatur seperti pada kegiatan latihan secara rutin dalam penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya bagi petugas.
4. Belum terwujudnya secara maksimal kerjasama antar lembaga/instansi dan masyarakat dengan pemerintah

Selain itu tantangan yang dihadapi antara lain :

1. Kota Bukittinggi dengan luas kurang lebih 25 kilometer persegi wilayah terbangun lebih dari 72% dan sebagian besar adalah merupakan kawasan pemukiman padat penduduk, bangunan pemerintah/swasta dan pusat perdagangan.
2. Secara Geographis Wilayah Kota Bukittinggi merupakan terletak pada jalur perbukitan pada gugusan bukit barisan pulau Sumatera, yang mana dilalui oleh Patahan Sumatera (Sumatera Vault) pada sepadan Ngarai Sianok.
3. Potensi ancaman bencana alam sesuai rekomendasi pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Padang tahun 2009 adalah Gempa, Gunung Api, Longsor dan Kebakaran.

4. Perubahan paradigma responsif menjadi preventif merupakan tantangan yang perlu disikapi secara bersama Pemerintah, Badan Usaha dan Masyarakat atau secara bersama-sama dengan gotong royon

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Terdapat penyesuaian program dan jumlah kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana, Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas pokok dan Fungsi Eselon III dan IV BPBD Kota Bukittinggi. Sehingga terjadi penambahan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi BPBD . Namun belum semua Program dan Kegiatan BPBD sesuai dengan Tupoksinya dapat ditampung pada Anggaran 2018 dan Rencana Kerja 2019 karena terbatasnya anggaran yang disediakan hanya Rp. 1.915.240.970,-. Ada kegiatan yang menjadi prioritas juga namun tidak dapat ditampung seperti Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Terlampir Tabel T-C.31

Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kota Bukittinggi

Nama Perangkat Daerah : BPBD Kota Bukittinggi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program pelayanan administrasi perkantoran			TOTAL	1.986.740.970	Program pelayanan administrasi perkantoran			TOTAL	1.801.235.000	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	BPBD	Jumlah materai, perangko, buku cek, benda pos lain yang terbeli		740.000	Penyediaan jasa surat menyurat	BPBD	Jumlah materai, perangko, buku cek, benda pos lain yang terbeli	4 item	550.000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPBD	Jumlah Rekening listrik/komunikasi yang yang dibayar	4 item	18.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPBD	Jumlah Rekening listrik/komunikasi yang yang dibayar	12 bulan/rekening	11.000.000	

RENJA BPBD 2020

3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BPBD	Jumlah Kendaraan dan peralatan Dinas / Operasional yang yang terpelihara	12 bulan/rekening	191.216.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BPBD	Jumlah Kendaraan dan peralatan Dinas / Operasional yang yang terpelihara	3 kendaraan roda 4, 6 kendaraan roda 2, mesin apung, cinsaw	159.964.000	
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BPBD	Jumlah peralatan dan bahan Kebersihan Kantor yang terbeli	3 kendaraan roda 4, 6 kendaraan roda 2, mesin apung, cinsaw	8.8.000.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BPBD	Jumlah peralatan dan bahan Kebersihan Kantor yang terbeli	28 item	3.944.880	
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	BPBD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor diperbaiki	28 item	69.000.000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	BPBD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor diperbaiki	6 jenis	1.500.000	
6	Penyediaan alat tulis kantor	BPBD	Jumlah alat tulis kantor yang terbeli	59 item	15.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	BPBD	Jumlah alat tulis kantor yang terbeli	59 item	10.870.700	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPBD	Jumlah cetak, jumlah penggandaan, jumlah yang	3 item	15.400.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPBD	Jumlah cetak, jumlah penggandaan, jumlah yang	3 item	7.014.900	

			terjilid					terjilid			
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPBD	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan dibeli	7 item	6.200.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPBD	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan dibeli	7 item	2.198.390	
9	Penyediaan makanan dan minuman Rapat	BPBD	Jumlah Makanan dan Minuman lembur, rapat dan tamu kantor yang tersedia	12 bulan	38.250.000	Penyediaan makanan dan minuman Rapat	BPBD	Jumlah Makanan dan Minuman lembur, rapat dan tamu kantor yang tersedia	12 bulan	8.440.000	
10	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	BPBD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi yang diikuti	12 bulan	250.000.000	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	BPBD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi yang diikuti	12 bulan	76.000.000	
11	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang	BPBD	Jumlah Pegawai Non PNS dibayar	1 tahun	10.000.000	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang	BPBD	Jumlah Pegawai Non PNS dibayar	1 tahun	3.121.210	

RENJA BPBD 2020

	dan Jasa Pemerintah					dan Jasa Pemerintah					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1	Pengadaan Perlengkapan Kantor	BPBD	Jenis perlengkapan kantor yang terbeli		49.650.000	-	-	-	-	-	
2	Pembangunan Rehabilitasi gedung kantor	BPBD	Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor			-	-	-	-	-	
3	Pengadaan Peralatan Kantor	BPBD	Jumlah peralatan kantor yang terbeli		193.950.000	-	-	-	-	-	
4	Pengadaan Mebeleur	BPBD	Jumlah meubeleur yang terbeli		70.000.000	-	-	-	-	-	
5	Pengadaan Kendaraan	BPBD	Jenis Kendaraan			-	-	-	-	-	

RENJA BPBD 2020

	Dinas/Operasional		dinas/operasio an yang diadakan		500.000.000						
6	Pengadaan tanah Gedung Kantor	BPBD	lokasi Gedung Kantor yang tersedia		7.000.000.000	-	-	-	-	-	
7	Pembangunan gedung kantor	BPBD	Gedung Kantor yang terbangun			Pembangunan gedung kantor	BPBD	Gedung Kantor yang terbangun	1 paket	175.000.000	
8	Pemeliharaan berkala Mebeleur kantor	BPBD	Jumlah Pemeliharaan berkala Mebeleur Kantor			-	-	-	-	-	
9	Pemeliharaan berkala gedung kantor	BPBD	Jumlah Pemeliharaan berkala gedung Kantor			-	-	-	-	-	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					Program Peningkatan Disiplin Aparatur			2 stel	1.900.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	BPBD	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapann		106.000.000	-	-	-	-	-	

			ya yang terbeli								
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			1 dokumen	1.315.000	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BPBD	Jumlah Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun			-	-	-	-	-	
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	BPBD	Jumlah laporan keuangan SKPD tersusun			-	-	-	-	-	-
3	Penyusunan rencana kerja dan keuangan SKPD	BPBD	Jumlah Rencana kerja dan rencana keuangan yang tersusun			-	-	-	-	-	-
4	Penyusunan Revisi Renstra	BPBD	Revisi Renstra SKPD			-	-	-	-	-	-

	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam					Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam					
1	Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan penanggulangan bencana	BPBD	Jumlah masyarakat yang ikut serta dalam sosialisasi, jumlah sekolah yang ikutserta, jumlah masyarakat	1 kegiatan	75.584.000	Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan penanggulangan bencana	BPBD	Jumlah masyarakat yang ikut serta dalam sosialisasi, jumlah sekolah yang ikutserta, jumlah masyarakat	1 kegiatan	28.932.760	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	BPBD	Jumlah barang penanggulanga n bencana yg diadakan	1 Paket	299.500.000	-	-	-	-	-	
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusdalops	BPBD	Jumlah barang yang diadakan	1 Paket	47.000.000	-	-	-	-	-	
4	Operasional Pusdalops	BPBD	Jumlah pembayaran honorarium Pusdalops	1 Paket	1.340.000.000	Operasional Pusdalops		Jumlah pembayaran honorarium Pusdalops	1 Paket	826.587.600	

RENJA BPBD 2020

5	Pendamping keg BPBD Prov Jambore PRB	BPBD	Jumlah relawan yang ikut Jambore PRB	2 kegiatan	75.000.000	Pendamping keg BPBD Prov Jambore PRB		Jumlah relawan yang ikut Jambore PRB	2 kegiatan	38.890.000	
6	Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional	BPBD	Peningkatan Pencegahan dan Penanggulang an Bencana	1 Kegiatan	50.000.000	Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional	BPBD	Peningkatan Pencegahan dan Penanggulang an Bencana	1 Kegiatan	29.570.000,	
7	Penyediaan Dana Siap Pakai Darurat Bencana	BPBD	Operasional dan Bantuan darurat bagi korban bencana		1.000.000.000	-	-	-	-	-	
8	Pembangunan scub penahan tebing Panorama II Kelok Cindua (Musrembang)	BPBD	Operasional dan Bantuan darurat bagi korban bencana			-	-	-	-	-	
	Program Pendidikan dan Pelatihan Kepada Aparat Penyelenggara Penanggulangan Bencana					Program Pendidikan dan Pelatihan Kepada Aparat Penyelenggara Penanggulangan Bencana			-	-	

RENJA BPBD 2020

1	Pelatihan gabungan BPBD, SAR, TAGANA PMI dan Pusdalops	BPBD	Jumlah Aparatur dan relawan yang terlatih	1 kegiatan	150.000.000	Pelatihan gabungan BPBD, SAR, TAGANA PMI dan Pusdalops	BPBD	Jumlah Aparatur dan relawan yang terlatih	1 kegiatan	43.017.900	
	Program Sistem Kebencanaan					Program Sistem Kebencanaan					
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Pemetaan kawasan Rawan Bencana	BPBD	Jumlah dokumen Penanggulangan Bencana		400.000.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Pemetaan kawasan Rawan Bencana	BPBD	Jumlah dokumen Penanggulangan Bencana	1 dokumen	400.775.000,	
2	Pembuatan/penyusunan/perumusan Rencana Kontijensi menurut jenis bencana anggaran sharing dgn BNPB	BPBD	Jumlah dokumen kontijensi per jenis bencana		145.000.000	Pembuatan/penyusunan/perumusan Rencana Kontijensi menurut jenis bencana anggaran sharing dgn BNPB	BPBD	Jumlah dokumen kontijensi per jenis bencana	1 kegiatan	87.858.630	
3	Perumusan/penyusunan SOP Penanggulangan Bencana	BPBD	Jumlah dokumen SOP penanggulangan bencana tersusun	1 dokumen	35.000.000	-	-	-	-	-	
4	Penyediaan Informasi kebencanaan	BPBD	Jumlah informasi kebencanaan tersedia			-	-	-	-	-	

2.5 Penelaahan usulan Program Dan Kegiatan Bagi Masyarakat

Dari hasil rapat koordinasi pengurangan resiko bencana tingkat propinsi Sumatera Barat di rekomendasikan agar masing-masing daerah Kabupaten/Kota menganggarkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengurangan resiko bencana sesuai dengan Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, pada Kota Bukittinggi pada tahun anggaran 2012 dan 2013 telah terbentuk dan telah dilatih unsur masyarakat kelurahan dalam program desa/kelurahan tangguh bencana dengan nama kegiatan pembentukan dan pelatihan Ketahanan Bencana Lingkungan Kelurahan (KBLK) pada 24 Kelurahan di Kota Bukittinggi. Perlu peningkatan volume dan kuantitas kegiatan baik peningkatan sarana dan prasarana serta pelatihan sesuai harapan masyarakat pada Musrembang tingkat Kelurahan.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Kota Bukittinggi

Nama Perangkat Daerah :
BPBD

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	catatan
	Nihil	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu kepada Rencana Aksi Nasional (RAN) BNPB dan Visi Penanggulangan Bencana Nasional dalam mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana. Sistem Penanggulanga Bencana Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kegiatan penanggulangan bencana pada saat sebelum terjadi bencana adalah :

- a. Membuat Kajian Resiko Bencana
- b. Membuat Rencana Penanggulangan Bencana
- c. Membuat Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
- d. Membuat Rencana Aksi Pemulihan Bencana

3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja

a. Tujuan

Tujuan dari Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi adalah untuk mengupayakan pengurangan resiko bencana dan mitigasi bencana untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi masyarakat dalam menghadapi dan menanggulangi bahaya bencana lainnya.

b. Sasaran

Adapun sasaran dalam mencapai tujuan tersebut diatas adalah :

- i. Meningkatkan upaya pengurangan resiko bencana, mitigasi, kesiapsiagaan dalam menghadapi bahaya kebakaran dan bencana lainnya;
- ii. Pelibatan para pemangku kepentingan, badan usaha dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

- iii. Pengintegrasian Kebijakan Penanggulangan Bencana dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah).
- iv. Pemaduan program dan kegiatan penanggulangan bencana dengan para pihak terkait.
- v. Penguatan kapasitas kelembagaan SKPD terkait penanggulangan bencana.
- vi. Pelibatan masyarakat secara aktif untuk turut serta dalam upaya penanggulanga bencana.

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Setelah mengkaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan terwujudnya visi dan misi, Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Mengoptimalkan Pendayagunaan Ekonomi dan Potensi daerah maka dirumuskan usulan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam daftar lampir

Pada tahun 2020, dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat 3 program dan 19 Kegiatan guna mendukung penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan alokasi dana sebesar **Rp 1. 819.226.500,-**. Keseluruhan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi, dengan rincian sebagaimana tabel berikut 3.3dibawah.

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kota Bukittinggi

SOPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BUKITTINGGI										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	JUMLAH			TOTAL	1.819.226.500				3.937.700.000	-
A	NON URUSAN				360.313.500				739.603.000	-
I.	Program pelayanan administrasi perkantoran				359.303.500				713.603.000	RPJMD
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai, perangko, buku cek, benda pos lain yang terbeli	BPBD	4 item	600.000	APBD	-	1	1.200.000	RPJMD

RENJA BPBD 2020

2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening listrik/komunikasi yang yang dibayar	BPBD	12 bulan/rekening	8.000.000	APBD	-	1	16.000.000	RPJMD
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dan peralatan Dinas / Operasional yang yang terpelihara	BPBD	3 kendaraan roda 4, 6 kendaraan roda 2, mesin apung, cinsaw	108.180.000	APBD	-	1	216.360.000	RPJMD
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan Kebersihan Kantor yang terbeli	BPBD	28 item	4.133.500	APBD	-	1	8.267.000	RPJMD
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor diperbaiki	BPBD	6 jenis	2.000.000	APBD	-	1	4.000.000	RPJMD
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbeli	BPBD	59 item	7.500.000	APBD	-	1	15.000.000	RPJMD
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetak, jumlah penggandaan, jumlah yang terjilid	BPBD	3 item	5.000.000	APBD	-	1	5.000.000	RPJMD
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan dibeli	BPBD	7 item	3.000.000	APBD	-	1	6.000.000	RPJMD

RENJA BPBD 2020

9	Penyediaan makanan dan minuman Rapat	Jumlah Makanan dan Minuman lembur, rapat dan tamu kantor yang tersedia	BPBD	12 bulan	8.000.000	APBD	-	1	16.000.000	RPJMD
10	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi yang diikuti	BPBD	12 bulan	177.000.000	APBD	-	1	354.000.000	RPJMD
11	Penyediaan Jasa Non PNS	Jumlah Pegawai Non PNS dibayar	BPBD	1 tahun	31.900.000	APBD	-	1	61.776.000	RPJMD
11	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Honorarium PPHP dibayar	BPBD	1 tahun	5.000.000	APBD	-	1	10.000.000	RPJMD
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-	APBD			-	RPJMD
1	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jenis perlengkapan kantor yang terbeli	BPBD	1 Paket	-	APBD	-	-	-	RPJMD
2	Pembangunan Rehabilitasi gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor	BPBD	1 Paket	-	APBD	-	-	-	RPJMD
3	Pengadaan Peralatan	Jumlah peralatan kantor	BPBD	1 Paket		APBD	-	-		RPJMD

RENJA BPBD 2020

	Kantor	yang terbeli			-				-	
4	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang terbeli	BPBD	1 Paket	-	APBD	-	-	-	RPJMD
5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jenis Kendaraan dinas/operasioan yang diadakan	BPBD	1 Paket	-	APBD	-	-	-	RPJMD
6	Pengadaan tanah Gedung Kantor	lokasi Gedung Kantor yang tersedia	BPBD	1 Paket	-	APBD	-	-	-	RPJMD
7	Pembangunan gedung kantor	Gedung Kantor yang terbangun	BPBD	1 Paket	-	APBD	-	1	-	RPJMD
8	Pemeliharaan berkala Mebeleur kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Mebeleur Kantor	BPBD	1 Paket	-	APBD	-	-	-	RPJMD
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				-	APBD			-	RPJMD
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang terbeli	BPBD	1 Paket	-	APBD	-	-	-	RPJMD
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				-	APBD			26.000.000	RPJMD

RENJA BPBD 2020

1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	BPBD	1 dokumen	-	APBD	-	-	6.500.000	RPJMD
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan SKPD tersusun	BPBD	2 dokumen	-	APBD	-	-	6.500.000	RPJMD
3	Penyusunan rencana kerja dan keuangan SKPD	Jumlah Rencana kerja dan rencana keuangan yang tersusun	BPBD	3 dokumen	-	APBD	-	-	6.500.000	RPJMD
4	Penyusunan Revisi Renstra	Revisi Renstra SKPD	BPBD	4 dokumen	-	APBD	-	-	6.500.000	RPJMD
B	URUSAN				1.458.913.000				3.198.097.000	-
I.	Program Sistem Kebencanaan				379.273.000	APBD			991.767.000	RPJMD
1	Penyusunan Kajian Resiko Bencana	Jumlah Kajian Peta Rawan Bencana	Kota Bukittinggi	1 kegiatan	-	APBD	Sudah direalisasikan APBD th 2018	100 %	-	SPM
2	Sosialisasi pengurangan resiko bencana dan Kesiapsiagaan bagi	Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi	Kota Bukittinggi	1 Paket	0	APBD	Wajib 100 %/ Tahun	100 %	165.221.000	SPM

RENJA BPBD 2020

	masyarakat									
3	Sosialisasi Pengurangan Resiko dan Kesiapsiagaan bencana melalui wahana sosial media	Jumlah datayang disajikan, pemeliharaan dan pulsa data	BPBD	1 Paket	-	APBD	Sudah dapat ditampun g oleh Diskomin fo Bkt	100%	-	SPM
4	penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi Publik	jumlah rambu dan papan informasi	BPBD	1 Paket	0	APBD	Wajib 100 %/ Tahun	100 %	68.000.000	SPM
5	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen dan indikator aksi daerah	BPBD	1 kegiatan	-	APBD	Sudah direalisasi kan APBD th 2018	100 %	-	SPM
6	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen dan pengelolaan sumber daya serta struktural TD	BPBD	1 kegiatan	57.273.000	APBD	Wajib 100 %/ Tahun	100 %	114.546.000	SPM
7	Pelatihan Kesiapsiagaan dan Mitigasi bencana bagi Masyarakat	Jumlah peningkatan kapasitas masyarakat menghadapi bencana	BPBD	1 kegiatan	189.500.000	APBD	Wajib 100 %/ Tahun	100 %	379.000.000	SPM
8	Gladi Kesiapsiagaan pada Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana	jumlah masyarakat, lembaga pemerintah dan		1 kegiatan	50.000.000	APBD	Wajib 100 %/	100 %	100.000.000	SPM

RENJA BPBD 2020

	Nasional	badan usaha yang ikut					Tahun			
9	Jambore Pengurangan Resiko Bencana dan Bulan Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Masyarakat/Relawan/Aparatur yang terlibat		1 kegiatan	82.500.000	APBD	Wajib 100 %/ Tahun	100 %	165.000.000	SPM
10	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Perakatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan bencana	BPBD	1 dokumen	-	APBD	Wajib 100 %/ Tahun	100 %	-	SPM
II.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam				1.079.640.000	APBD			2.206.330.000	RPJMD
	Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	Jumlah Personil dan Stakeholder terkait		1 kegiatan	-		Wajib 100 %/ Tahun	100 %	-	SPM
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Jumlah Aparatur dan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	BPBD	1 kegiatan	1.079.640.000	APBD	Wajib 100 %/ Tahun	100 %	2.206.330.000	SPM
III.	Program Pendidikan dan Pelatihan Kepada Aparat Penyelenggara				-	APBD			-	RPJMD

RENJA BPBD 2020

	Penanggulangan Bencana									
	Pelatihan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana Bagi Aparatur	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur	BPBD	1 kegiatan	-	APBD	Wajib 100 %/ Tahun	100 %	-	SPM

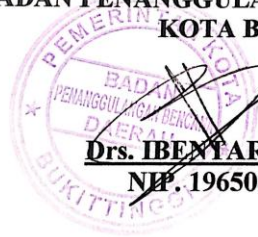
BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020 ini mengacu pada rencana strategis tahun 2016 – 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi dengan tujuan adanya kesinambungan dalam pelaksanaan kegiatan. Diharapkan kegiatan – kegiatan yang diajukan untuk tahun 2020 dapat dijalankan sesuai dengan pagu anggaran yang ada. Rencana kerja tahun 2020 akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun 2021.

Bukittinggi, Juni 2019

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BUKITTINGGI



Drs. IBENTARO SAMUDRA, MM
NIP. 19650829 199308 1 001

